Valuasi Ekonomi Ekowisata di Gunung Merapi

Mimin Dwi Hartono[1]

ABSTRAK

Kawasan hutan Gunung Merapi secara administratif sebagian berada di wilayah D.I. Yogyakarta, yaitu Kabupaten Sleman. Keterancaman lingkungan hidup Merapi sangat tinggi, yang ditandai dengan eksploitasi pasir yang mengalami defisit sampai 3,5 juta m kubik pertahun, degradasi sumber mata air yang begitu cepat, kepunahan satwa dan flora setempat serta kerusakan yang diakibatkan oleh ketidakmampuan pengelola (Dinas Kehutanan DIY dan KSDA DIY) dalam melestarikan alam Merapi. Ego-sektoral dan instansi pemerintah juga menyumbang kegagalan pengelolaan kawasan Merapi yang terientegrasi, karena masing-masing masih mementingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebagai upaya memperbaiki kinerja ke depan, saya melakukan studi valuasi ekonomi Ekowisata Merapi, dengan tujuan mengetahui apresiasi wisatawan, yang ditunjukkan dengan Kemauan untuk Membayar (*Willingness to Pay/WTP*), terhadap ekowisata Merapi ini. Metode yang digunakan adalah *Contingency Valuation Methods* (CVM), yaitu metode valuasi lingkungan dengan cara memberikan penawaran harga pada responden atau wisatawan secara bertingkat terhadap produk atau jasa tertentu, dalam hal ini jasa ekowisata Merapi.

Dari hasil perhitungan WTP wisatawan jauh melebihi tarif yang sekarang berlaku, yaitu Rp 169.600 dibanding dengan Rp15.000 (Domestik) dan Rp 40.000 (Mancanegara). WTP tersebut mengindikasikan bahwa apresiasi wisatawan sangat besar terhadap

---

[1] Penulis adalah Koordinator Wana Mandhira (YAWAMA) dan Peminat Ekonomi Lingkungan-Sumber Daya Alam
Alamat: Jl. Boyong No.7, Kaliurang, Sleman 55585 Yogyakarta
Telp/Fax 0274-895364 / 543807 Cel 0813-2878-3787
E-mail: wamatour@yahoo.com

kekayaan alam dan budaya Merapi yang dikemas lewat ekowisata Merapi.

Latar Belakang

Kawasan hutan Gunung Merapi (8650 Ha) terletak pada ketinggian antara 600 m dpl sampai dengan 2968 m dpl. Secara administratif termasuk dalam wilayah Jawa Tengah, meliputi Kabupaten Magelang, Klaten, danb Boyolali, dan sebagian berada di wilayah D.I. Yogyakarta, yaitu Kabupaten Sleman.

Secara astronomis wilayah ini terletak antara 0722'30" LS -0752'30" LS dan 11015'00" BT – 11037'30" BT. Iklim di wilayah Gunung Merapi termasuk tipe tropis basah. Tipe iklim berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Fergusson termasuk tipe C atau agak basah dengan nilai Q sebesar 33,3% sampai dengan 66%. Curah hujan bervariasi dengan curah hujan terendah sebesar 875 mm/tahun dan curah hujan tertinggi sebesar 2527 mm/tahun (Sutikno dkk, 2002). Bulan basah terjadi pada bulan November sampai dengan Mei sedangkan bulan kering terjadi pada bulan Juni sampai dengan Oktober (dengan curah hujan yang relatif lebih rendah)

Aliran air permukaan yang berasal dari Gunung Merapi terbagi menjadi 3 arah aliran, yaitu aliran sungai yang masuk ke DAS Progo bagian barat, DAS Opak di bagian tengah dan DAS Bengawan Solo di bagian timur.

Pada umumnya debit aliran mata air masih di bawah 10 liter per detik, namun demikian juga dijumpai mata air dengan debit aliran yang besar seperti Umbul Ingas, Sungsang dan Ponggok di Kabupaten Boyolali dengan debit >1000 liter per detik; Mata air Doyo, Nilo, Nepen, Kapilaler, Kayan, Sigedang, Pengging dan Kendat di Kabupaten Boyolali dengan debit aliran antara 118 sampai 710 liter per detik; Mata air Plunong, Kapilaler dan Nolo Cokrotulung di Kabupaten Klaten dengan debit antara 350 sampai 1200 liter per detik; Mata air Kali Kuning di Kabupaten Sleman dengan debit sebesar 1220 liter per detik dan masih banyak lagi mata air dengan debit antara 5 hingga 10 liter per detik (*Dinas Pekerjaan Umum D.I Yogyakarta, 1999*).

Mata air tersebut sudah dilakukan pemanfaatan untuk berbagai kepentingan diantaranya untuk irigasi, perkebunan, peternakan, perikanan, obyek wisata dan juga untuk air kemasan.

Mendesaknya Kebijakan Berbasis Ekonomi Lingkungan

Keterancaman lingkungan hidup Merapi sangat tinggi, yang ditandai dengan eksploitasi pasir yang mengalami defisit sampai 3,5 juta m kubik pertahun, degradasi sumber mata air yang begitu cepat, kepunahan satwa dan flora setempat serta kerusakan yang diakibatkan oleh ketidakmampuan pengelola (Dinas Kehutanan DIY dan KSDA DIY) dalam melestarikan alam Merapi. Ego-sektoral dan instansi pemerintah juga menyumbang kegagalan pengelolaan kawasan Merapi yang terientegrasi, karena masing-masing masih mementingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pola pembangunan masih kental bercorak konvensional yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan mengabaikan ketersediaan dan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Hal ini bisa dilihat pada pola pengembangan pariwisata yang massal di Kaliurang, Kaliadem, dan Ketep, serta pembiaran terhadap penambangan pasir yang sudah sangat eksploitatitf, karena sudah mencapai hutan lindung (Magelang).

Untuk itulah sangat diperlukan inovasi dari semua pihak dan kemauan politik dari peemrintah mengubah pola pembangunan konvensional pada pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Salah satu cara adalah dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang memadukan antara peningkatan ekonomi masyarakat, penghargaan sosial budaya penduduk, dan pelestarian lingkunga hidup. Kegiatan tersebut salah satunya adalah ekowisata atau ecotourism.

Ekowisata adalah perjalanan wisata dengan tujuan untuk menikmati dan menghargai kekayaan alam dan budaya tertentu dengan memperhatikan daya dukung lingkungan hidup dan permberdayaan masyarakat. Saat ini, ekowisata menjadi model bagi pengembangan wisata yang berbasis pada alam.

Valuasi Ekowisata Merapi

Di Merapi, kegiatan ekowisata, yang disebut Ekowisata Merapi, yang sedang berkembang dijalankan oleh "Kagem Merapi Tour", yang berada di bawah manajemen Yayasan Wana Mandhira (Yawama), sebuah NGO yang bergerak dalam advokasi dan konservasi lingkungan hidup di kawasan Merapi sejak 1998.

Sejak dikembangkan pertengahan tahun 2000, peminatnya cukup banyak, dan berasal dari berbagai negara di dunia, seperti Jepang, Belanda, Finlandia, Amerika, Thailand, dll. Sampai saat ini tercatat ratusan orang yang sudah mengikuti petualangan ekowisata Merapi.

Dalam ekowisata Merapi, wisatawan diajak untuk menikmati panorama alam dan kekayaan budaya masyarakat di Kaliurang, Turgo, dan Kaliadem, tiga dusun yang terletak di wilayah selatan Merapi. Dengan berjarak sekitar 15 km, wisatawan dapat menikmati kekayaan alam Merapi seperti Anggrek Vanda Tri Color, Kantung Semar, Sarangan, Burung Kipasan Merapi, Elang Jawa, Menjangan, dan sebagainya. Apabila sedang Merapi sedang aktif dan mengeluarkan lava pijar, wisatawan akan menikmati pemandangan yang elok berupa lelehan dan guguran lava Merapi yang merah membara. Lelehan lava inilah yang banyak diminati wisatawan, sehingga saat Merapi dalam kondisi aktif peningkatan wisatawan sangat signifikan.

Sampai saat ini, tarif yang dikenakan per wisatawan adalah Rp 15,000 orang untuk domestik dan Rp 40,000 orang untuk mancanegara. Fasilitas yang akan diterima adalah guide lokal, minuman ringan, makanan khas Jadah Tempe yang disediakan penduduk setempat. Pengelola juga memberikan batasan maksimal peserta per perjalanan, yaitu maksimal 15 orang. Hal ini untuk tetap menjaga daya dukung lingkungan yang dilewati sehingga meminimalkan dampak buruk bagi satwa maupun flora yang hidup disekitarnya.

Sebagai upaya memperbaiki kinerja ke depan, saya melakukan studi valuasi ekonomi Ekowisata Merapi, dengan tujuan mengetahui apresiasi wisatawan, yang ditunjukkan dengan Kemauan untuk Membayar (*Willingness to Pay/WTP*), terhadap ekowisata Merapi ini,

Metode yang digunakan adalah *Contingency Valuation Methods* (CVM), yaitu metode valuasi lingkungan dengan cara memberikan penawaran harga pada responden atau wisatawan secara bertingkat terhadap produk atau jasa tertentu, dalam hal ini jasa ekowisata Merapi.

Responden adalah wisatawan dari periode Januari 2002-Juni 2003 yang berjumlah 100 orang dari berbagai negara. Jumlah 100 dipilih sebagai jumlah yang cukup ideal untuk merepresentasikan wisatawan keseluruhan dan meminimalkan bias.

Data dari responsen diperoleh melalui wawancara langsung melalui kuisioner tertutup dan terbuka. Kuisioner terdiri atas pertanyaan nama, umur, jenis kelamin, warga negara, dan berapa kali pernah berkunjung ke Indonesia. Sedangkan pertanyaan terbuka berisi pendapat tentang ekowisata Merapi yang meliputi alasan datang ke Indonesia, motivasi mengikuti ekowisata Merapi, lama tinggal, dan pendapat tentang kualitas kegiatan ini. Terakhir adalah pertanyaan yang berisi berapa tarif maksimal yang mau dibayarkan oleh wisawatan (WTP), dengan memberikan penawaran pertama sebesar Rp 75.000 ke Rp150.000 dan terakhir Rp200.000.

Dari 100 responden, hasil yang didapatkan adalah sebanyak 16 orang bersedia membayar Rp75.000; 21 orang bersedia membayar Rp 150,000 dan 63 orang bersedia membayar Rp200.000.

Apabila dirata-rata maka per orang bersedia membayar Rp169.600, melalui perhitungan:

$$\text{Rerata maksimal WTP} = \frac{(\text{WTP} \times \text{N})}{n}$$

$$= \frac{(75.000 \times 16)+(150.000 \times 21)+(200.000 \times 63)}{100}$$

$$= 169.600$$

Kesimpulan

Dengan demikian, WTP wisatawan jauh melebihi tarif yang sekarang berlaku, yaitu Rp 169.600 dibanding dengan Rp15.000 (Domestik) dan Rp40.000 (Mancanegara).
WTP tersebut mengindikasikan bahwa apresiasi wisatawan sangat besar terhap kekayaan alam dan budaya Merapi yang dikemas lewat ekowisata Merapi.

Tentu saja pengelola tidak bisa begitu saja menaikkan tarif sebesar itu, tetapi kenaikan tarif harus disertai dengan perbaikan kinerja dan manajemen pengelola sehingga memberikan kepuasan bagi wisatawan. Disamping itu, peningkatan harga harus dilakukan secara bertahap dan melalui proses sosialisasi yang baik.

Hal yang sangat penting adalah keharusan bagi pengelola dan masyarakat untuk menjaga kelestarian alam dan budaya Merapi, sebab itulah asset utama kegiatan ini. Apabila hal tersebut tidak dijaga, maka yang terjadi adalah penurunan minat wisatawan.

Pelestarian ini tidak hanya merupakan tanggung jawab pengelola dan masyarakat, namun juga pemerintah, karena lewat ekowisata ini terjadi efek penganda yang baik, berupa terpromosikannya potensi daerah, sumbangan bagi ekonomi lokal, dan pendapatan asli daerah.